



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) Sebagaimana Telah diubah dengan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ke dua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 799);

25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Perusahaan Perseroan Daerah PETRO MUBA (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Muba Energi Maju Berjaya (PERSERODA) (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 1);

31. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi & tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sumbas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Rancangan APBD terdiri atas pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.366.370.761.800,- (*Tiga Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp529.884.959.800,- (*Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta*

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.466.151.000,- (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.195.787.000,- (*Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,- (*Tiga Puluh milyar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp278.223.021.800,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.466.151.000,- (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan;
 - b. pajak barang dan jasa tertentu makan dan/atau minuman;
 - c. pajak barang dan jasa tertentu kesenian dan Hiburan;
 - d. pajak Reklame;
 - e. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu Parkir;
 - g. pajak Air Tanah;
 - h. pajak Sarang Burung Walet;
 - i. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - j. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:

- k. pajak Mineral Bukan Logam dan batuan;
 - l. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
 - m. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.585.642.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - (3) Pajak barang dan jasa tertentu makan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.959.803.000,- (*Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah*).
 - (4) Pajak barang dan jasa tertentu kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.511.000,- (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.729.859.000,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - (6) Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.521.171.000,- (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - (7) Pajak barang dan jasa tertentu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp706.033.000,- (*Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp Rp420.000.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp332.697.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.904.394.000,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp25.139.938.000,- (*Dua Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

- (12) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.029.103.000,- (*Dua Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu rupiah*).
- (13) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,- (*Empat Puluh Milyar Rupiah*).
- (14) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,- (*Lima Puluh Milyar Rupiah*)

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.195.787.000,- (*Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha;
 - c. retribusi Perizinan Tertentu:
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.000.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.248.787.000,- (*Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (*Dua milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,- (*Tiga Puluh Milyar*

Rupiah), Merupakan Deviden atas penyertaan modal sebesar Rp30.000.000.000,- (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp278.223.021.800,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.836.485.802.000,- (*Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.710.885.802.000,- (*Dua Triliun Tujuh Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.600.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar ebesar Rp0,- (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 3.408.867.666.146,- (*Tiga Triliun Empat Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.384.132.390.457,- (*Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 260.994.266.412,- (*Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 915.867.821.096,- (*Sembilan Ratus Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp140.278.069.039,- (*Seratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.992.233.910,- (*Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 523.070.692.769,- (*Lima Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.314.120.000,- (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.347.961.221,- (*Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.593.747.003,- (*Seratus Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp336.951.016.463,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp797.330.777,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp66.517.305,- (*Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.997.200.620,- (*Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp494.667.382.300,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp494.667.382.300,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 42.496.904.346,- (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp69.983.013.972,- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.983.013.972,- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp27.486.109.626,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.486.109.626,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp42.496.904.346,- (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.496.904.346,- (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Batuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Batuan Soasial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Batuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Batuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam / Tambahan DBH Minyak dan Gas Alam Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Oranisasi Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemrintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 22

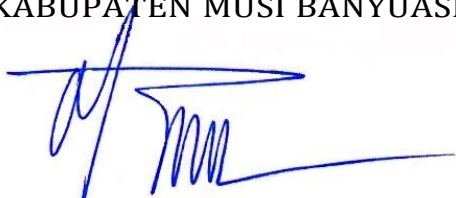
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI



KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.729.859.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.314.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.314.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	345.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	345.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	859.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	859.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	70.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	70.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	420.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	420.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	420.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	332.697.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	332.697.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	332.697.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.029.103.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.100.103.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.100.103.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	929.000.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	929.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.904.394.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	29.904.394.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	29.904.394.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.139.938.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.895.077.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.895.077.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	16.244.861.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	16.244.861.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	65.910.160.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	18.959.803.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	3.029.803.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	15.930.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	44.521.171.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	38.500.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	6.021.171.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.585.642.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	900.000.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	330.000.000,00
4.1.01.19.03.0007	PBJT-Wisma Pariwisata	355.642.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	706.033.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	706.033.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	137.511.000,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	29.200.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	90.311.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	40.000.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	40.000.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	40.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	50.000.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	50.000.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	50.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	447.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	200.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	200.000.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	247.000.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	220.000.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.248.787.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	310.000.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	310.000.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	210.000.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	210.000.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	40.000.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	40.000.000,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	5.000.000,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	142.427.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	142.427.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.541.360.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.541.360.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	30.000.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	30.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	30.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	35.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00
4.1.04.01.05.0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	35.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	5.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.000.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.000.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.550.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.550.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.550.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	317.200.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	9.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	3.000.000,00
4.1.04.12.06.0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	1.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	158.200.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	25.000.000,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	3.000.000,00
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	200.000,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	100.000.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	100.000,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	100.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.600.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	3.500.000,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	100.000,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	5.000.000,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.000.000,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	500.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	500.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	100.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	100.000.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	29.500.000,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	100.000.000,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	100.000.000,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	100.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	234.332.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	162.413.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	85.945.000,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	36.848.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	8.015.000,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	3.725.000,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	2.309.000,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	6.293.000,00
4.1.04.15.08.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK	3.000,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.164.000,00
4.1.04.15.08.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.299.000,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	4.433.000,00
4.1.04.15.08.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	1.886.000,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	356.000,00
4.1.04.15.08.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.000,00
4.1.04.15.08.0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	905.000,00
4.1.04.15.08.0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	799.000,00
4.1.04.15.08.0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.921.000,00
4.1.04.15.08.0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.700.000,00
4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	248.000,00
4.1.04.15.08.0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	92.000,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	613.000,00
4.1.04.15.08.0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK	272.000,00
4.1.04.15.08.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	564.000,00
4.1.04.15.08.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	22.000,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.919.000,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	65.000.000,00
4.1.04.15.09.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	535.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.09.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.200.000,00
4.1.04.15.09.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.184.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	245.486.489.800,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	245.486.489.800,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	245.486.489.800,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	223.791.787.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	223.791.787.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	223.791.787.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.946.209.896.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	934.898.116.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	913.927.896.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	20.672.843.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	287.377.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.000.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.011.311.780.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	226.307.447.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	569.216.170.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	199.828.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	18.877.397.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	191.474.641.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.092.455.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.143.842.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	540.884.119.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	540.884.119.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	540.884.119.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	125.600.000.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	125.600.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	90.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	600.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	3.366.370.761.800,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.384.132.390.457,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01	Belanja Pegawai	1.260.994.266.412,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	786.371.961.977,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	621.356.835.361,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	408.504.628.548,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	212.852.206.813,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	53.709.467.363,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.566.790.805,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.142.676.558,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.779.258.640,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.760.207.440,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	19.051.200,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	26.952.653.600,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.855.513.600,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	97.140.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.702.078.470,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.942.996.170,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.759.082.300,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	20.264.567.922,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.294.822.444,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.969.745.478,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.450.060.852,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.403.118.410,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	46.942.442,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	225.725.107,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	210.224.830,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.500.277,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.672.641.389,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.146.764.502,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.525.876.887,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.564.566.306,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.038.102.169,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	526.464.137,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.195.921.913,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.692.540.246,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.503.381.667,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.498.185.054,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.292.199.859,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	205.985.195,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	328.348.833.195,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	298.797.072.717,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	282.958.297.717,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	15.838.775.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	13.596.445.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	13.405.195.000,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	191.250.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	14.181.241.500,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	14.106.241.500,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	75.000.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.774.073.978,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	11.444.320,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	153.721.480,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	966.950,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	23.874.080,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	403.468.090,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	4.500.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	16.600.000,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	14.070.540,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	228.249.588,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	342.136.750,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	230.600.840,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.941.340,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	150.000.000,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	187.500.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.074.684.780,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	13.994.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	13.994.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	174.960.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	174.960.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.374.408.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.374.408.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	178.315.200,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	178.315.200,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.367.800,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.367.800,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	448.526.380,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	448.526.380,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.403.755.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	200.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	35.755.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.166.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.042.770.663,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	70.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	70.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.200.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.200.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.213.284.072,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.213.284.072,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	7.798.640,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	7.798.640,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.600.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.205.928,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.205.928,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	600.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	600.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.604.982.023,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	38.430.370,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	241.738,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	26.442.463,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	100.867.023,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.125.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.150.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.517.636,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.059.305,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	309.817.143,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	246.199.745,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	508.631.600,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	150.000.000,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	187.500.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	117.162.895.797,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	117.162.895.797,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	117.162.895.797,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.867.821.096,00
5.1.02.01	Belanja Barang	156.533.126.248,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	149.644.597.481,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.949.940.575,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.594.813.493,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.595.488.920,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	62.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.945.394.230,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	159.977.743,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.448.478.363,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	88.900.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.669.660,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	715.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.936.305.187,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.553.060.211,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	5.146.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.516.705.127,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.937.599.609,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.631.759.130,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.221.120.336,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.653.565.650,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.444.131.840,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.875.051.496,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.635.837.668,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	12.231.000,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	546.629.790,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.952.310.842,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	284.622.750,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.556.671.868,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.929.235.900,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	71.350.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.411.250,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	742.149.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.963.976.678,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	318.400.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.113.750.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	337.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.020.982.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.981.529.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	36.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	803.550.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	1.165.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	133.900.965,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	5.017.200,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	424.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	986.908.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.266.900.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	169.960.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.888.528.767,00
5.1.02.01.04.0012	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	6.597.936.420,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	290.592.347,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	411.034.740.193,08
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	285.843.908.350,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.156.325.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.435.289.568,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	691.580.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.080.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	42.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	37.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.215.340.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	218.900.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	50.121.700.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.102.750.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	414.588.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	47.800.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.468.300.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.087.700.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.855.111.111,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.289.600.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	915.260.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	4.770.480.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.133.700.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.729.895.790,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.592.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.049.210.800,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.574.470.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.704.157.956,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.706.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	5.860.844.444,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	433.500.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.306.600.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	151.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	438.900.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	31.650.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	344.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	70.923.500,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	268.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.694.096.980,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.724.950.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	143.200.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	229.441.750,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	262.494.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	39.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.705.860.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	402.233.433,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.349.863.983,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	34.563.463.603,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	181.200.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.663.497.761,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.603.465.272,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.208.910.333,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	229.100.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	490.455.066,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	59.412.437.761,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.061.078.240,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	36.386.658.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	588.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.239.600.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.548.329.710,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	19.545.311,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	2.569.226.500,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.909.792.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	57.960.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.258.120.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	176.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	265.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.782.025.500,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	444.117.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	458.489.500,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.229.640.000,00
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	237.840.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.052.568.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.227.878.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	560.310.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	329.175.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	10.560.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.994.645.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	930.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	31.259.746.082,08
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	97.020.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	330.000.000,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	28.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	4.381.900.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	220.095.977,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.736.616.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	8.908.001.332,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	5.976.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	866.855.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	22.319.800,08
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.120.449.973,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	150.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	728.848.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	500.000.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	348.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	10.640.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	835.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.572.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.972.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.500.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	925.200.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	608.700.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	316.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.059.088.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.436.113.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.622.975.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	78.437.883.623,92
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.544.731.830,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	2.266.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	533.914.700,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.589.016.300,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	226.560.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	228.000.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	443.330.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	80.808.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.146.680,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.536.238.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	14.500.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	51.132.150,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	47.286.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	250.800.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.804.779.711,92
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.707.279.711,92
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	97.500.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.002.567.220,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	30.283.775.220,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.718.792.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	85.804.862,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	85.804.862,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	144.311.143.233,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	143.820.878.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.208.786.313,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.612.092.187,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	490.264.733,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	490.264.733,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.567.095.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.567.095.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.887.395.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	5.679.700.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	114.983.832.798,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	114.983.832.798,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	114.983.832.798,00
5.1.05	Belanja Hibah	140.278.069.039,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.704.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.204.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.204.000.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.140.000.000,00
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.140.000.000,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.140.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	129.434.069.039,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	85.469.023.722,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	37.582.556.672,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.886.467.050,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	38.915.407.084,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	38.915.407.084,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	696.223.913,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	695.968.613,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	255.300,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	2.808.414.320,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	2.808.414.320,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.545.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.545.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	48.182.233.910,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	47.653.791.910,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	47.653.791.910,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	528.442.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	528.442.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	18.810.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	18.810.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	18.810.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	523.070.692.769,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	9.464.800.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	7.072.280.000,00
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	49.320.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.343.200.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	849.320.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	800.000.000,00
5.2.01.01.03.0009	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	49.320.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.644.428.398,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.899.350.080,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	3.899.350.080,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	745.078.318,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	572.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	173.078.318,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.393.453.467,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	12.254.234.077,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	83.769.147,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.079.997.150,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	189.108.480,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	688.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	10.213.359.300,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.330.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.330.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	15.000.000,00
5.2.02.02.03.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	15.000.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	120.889.390,00
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	120.889.390,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.448.490,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.650.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	6.650.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	798.490,00
5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	798.490,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	175.387.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	175.387.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	68.310.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	37.272.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	9.805.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	60.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.253.686.521,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.090.111.032,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.523.120,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.066.587.912,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.825.820.429,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	11.137.478.154,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	263.948.140,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.380.683.820,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.072.125.039,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.920.275.442,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	51.309.834,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.337.755.060,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	984.320.820,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	155.771.590,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	882.855.850,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	40.690.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	1.274.116.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.266.738.148,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.148.933.448,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	343.977.285,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	775.091.163,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	6.555.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	23.310.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	117.804.700,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	75.344.700,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	17.760.000,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	2.500.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	22.200.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.609.388.869,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.597.838.869,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.477.838.869,00
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	320.000.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	800.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.550.000,00
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	11.550.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	592.087.351,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	584.087.351,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	337.402.500,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	218.442.288,00
5.2.02.08.01.0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	28.242.563,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.000.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	8.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	17.891.163.214,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	14.704.857.004,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	6.801.110.756,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.903.746.248,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.186.306.210,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.194.158.646,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	501.457.075,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.490.690.489,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	42.893.000,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	42.893.000,00
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	42.893.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	181.047.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	181.047.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	181.047.000,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	12.610.544,00
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	12.610.544,00
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	12.610.544,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	181.224.887,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	83.433.887,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	70.085.087,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	13.348.800,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	97.791.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	37.851.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	59.940.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.444.243.200,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.444.243.200,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	499.500.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	849.283.200,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	95.460.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	970.408.920,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	970.408.920,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	348.441.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	621.967.920,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.681.752.212,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.681.752.212,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.681.752.212,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.593.747.003,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	96.680.990.650,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.385.857.200,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	37.687.528.185,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.886.213.600,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.413.840.581,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.238.265.590,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.260.009.244,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	400.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.295.133.450,00
5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	2.319.610.400,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	4.975.523.050,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.254.748.160,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.254.748.160,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	87.017.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.039.996.800,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	127.734.360,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.658.008.193,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.658.008.193,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.658.008.193,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	305.099.169.477,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	265.462.469.650,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	217.382.167.894,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	300.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	47.780.301.756,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	39.636.699.827,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	37.400.309.827,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2.236.390.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	24.197.964.986,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	313.000.000,00
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	313.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.376.379.800,00
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	5.376.379.800,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	18.508.585.186,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	18.508.585.186,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.653.882.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	7.653.882.000,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	6.103.882.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.550.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	281.502.777,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	181.263.460,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	181.263.460,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	100.239.317,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	100.239.317,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	515.828.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	465.828.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	465.828.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	50.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	66.517.305,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	66.517.305,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	26.615.025,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	39.902.280,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.997.200.620,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00
5.4	BELANJA TRANSFER	494.667.382.300,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	494.667.382.300,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	494.667.382.300,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	494.667.382.300,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	494.667.382.300,00
	Jumlah Belanja	3.408.867.666.146,00
	Total Surplus/(Defisit)	-42.496.904.346,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	69.983.013.972,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	69.983.013.972,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	69.983.013.972,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	27.486.109.626,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	27.486.109.626,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	27.486.109.626,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27.486.109.626,00
	Pembiayaan Netto	42.496.904.346,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024

Pj Bupati

H. SANDI FAHLEPI